



# Buletin Parlementaria



## Parlemen Serius Ciptakan Kawasan ASEAN Bebas Narkoba

Nomor 1249/I/VI/2023 • Juni 2023



9 772614 339005



**3 Kebijakan Rawat  
Inap BPJS Tak  
Boleh Persulit  
Rakyat**



**18 Irma Suryani  
Tegaskan  
Pembahasan  
RUU Kesehatan  
Jalan Terus**



# Parlemen Serious Ciptakan Kawasan ASEAN Bebas Narkoba



FOTO: RDN/PDT

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon memimpin kunjungan delegasi Anggota Parlemen se-ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) ke Balai Besar Rehabilitasi Narkotika BNN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

**K**etua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memimpin kunjungan para delegasi Anggota Parlemen se-ASEAN alias ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke Balai Besar Rehabilitasi Narkotika yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para delegasi AIPA melihat langsung sejumlah sarana dan prasarana penanganan para korban pengguna Narkoba. Mulai dari tempat rehabilitasi, laboratorium, hingga sejumlah pelayanan lainnya.

Fadli menegaskan kunjungan ini membuka mata kawasan bahwa Indonesia serius memberantas narkoba hingga memiliki tempat seluas 11,3 hektare tersebut. Kunjungan ini menjadi satu di antara agenda dalam Sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary

*Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)* selama 30-31 Mei 2023.

"Jadi teman-teman dari Parlemen Negara ASEAN juga sangat aktif bertanya, senang, dan melihat. Karena ini fasilitasnya cukup lengkap dan menunjang, ada satu proses penanganan pro justicia itu dilakukan eksemnasinya di sini," ujar Fadli kepada **Parlementaria** di sela-sela kunjungan, Rabu (31/5).

”

**SEBAGAI DAERAH WISATA NASIONAL, KAMI HARAP JANGAN SAMPAI WILAYAH INI MENJADI TEMPAT PEREDARAN NARKOTIKA.**

Meskipun demikian, Fadli mendorong agar balai rehabilitasi narkoba tidak hanya terpusat di lokasi tersebut saja. Bisa saja, menurutnya, tiap provinsi memiliki balai rehabilitasi dalam skala yang lebih kecil. Oleh karena, tegasnya, perang melawan narkoba merupakan hal yang sangat serius, disebabkan Indonesia menjadi sasaran utama bagi bandar-bandar internasional yang ingin memasokkan narkoba ke dalam negeri.

"Karena jumlah penduduk kita besar, wilayah kepulauan kita besar, sehingga sangat rentan. saya kira tentu BNN perlu diperkuat dari sisi anggaran, hukum, SDM, dan sebagainya," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ditambahkan oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN, Irjen (PoL) Agus Irianto, bahwa kunjungan Delegasi AIPA ini merupakan wujud adanya kerja sama BNN dengan negara di ASEAN dalam mewujudkan target ASEAN Bebas Narkoba pada 2025 mendatang.

"Selain juga kerja sama lain, misalnya ada ASOD (*ASEAN Senior Officer on Drugs*) yang biasanya diselenggarakan Agustus-September. Kemudian ada lagi sharing informasi lainnya misalnya DAINA (*Drug Abuse Information Network for ASIA Pacific*), ada juga ADMN (*Asia Drug Monitoring Network*)," ujar Irjen Agus.

Ia menegaskan beragamnya kerja sama internasional ini diperlukan guna terus memantau jika ada jenis narkoba dan modus operandi baru. "Juga kerja sama operasional kalau misalnya ada informasi peredaran narkoba dari satu negara ke negara lainnya kita punya koordinasi, dan kita lakukan sharing informasi untuk digunakan proses penangkapan dan proses hukum lainnya," tutup Irjen Agus. **rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Kebijakan Rawat Inap BPJS Tak Boleh Persulit Rakyat



FOTO: ENO/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah menjamin rakyat tidak akan dipersulit dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada program BPJS Kesehatan. Penghapusan kelas perawatan yang terdapat di sistem BPJS Kesehatan menjadi KRIS harus diiringi dengan persiapan yang memadai.

"Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, Pemerintah harus memastikan bahwa rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar pada program BPJS Kesehatan tidak akan mempersulit rakyat," kata Puan, di Jakarta, di Jumat (2/6).

Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan

(Kemenkes), sudah ada 728 rumah sakit yang memenuhi kriteria 12 Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN). Menurut Puan, peningkatan jumlah rumah sakit dan perawatan yang berkualitas sangat penting untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat. "Negara harus memastikan rumah sakit yang ada memadai dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat yang membutuhkan," ucapnya.

Penerapan sistem KRIS di rumah sakit akan menghapus sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3 peserta BPJS Kesehatan. Meski sudah ada tahap uji coba, namun program KRIS ini baru akan terealisasi sepenuhnya setelah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 rampung dibahas. **aha**



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindy, S.Sos, (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos, (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,  
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,  
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh  
Pawestri, S.I.Kom, Nadhien Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom,  
Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske  
Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,  
Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Natfisa Hanum  
Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Bagegys Maeshyntha, Anju  
Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budianti, Arief Rachman,  
R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldidi Opie,  
Hasni Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,  
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,  
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita,  
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,  
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Ria Damayanti

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Dari OKU Timur, Gus Imin Serukan Pancasila Karya dan Milik Anak Bangsa

**W**akil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat

(Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menjadi Inspektur Upacara Apel Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila bersama 20 ribu Kader Penggerak NU di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, pada Kamis (1/6). Dalam amanatnya, pria yang akrab disapa Gus Imin ini bersyukur Pancasila tetap sakti dan menjadi tameng kuat dalam menjaga dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam.

"Kita semua alhamdulillah tetap semangat dan terus menjadi bagian dari perjuangan bangsa kita untuk terus setia pada Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan seluruh panji-panji kehidupan bangsa," kata pria yang akrab disapa Gus Imin dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**.

Politisi PKB ini menyampaikan bahwa Pancasila terbukti sakti menjadi tameng keberagaman etnis, ras, golongan, budaya, hingga agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ia bersyukur kesaktian Pancasila tersebut tetap terjaga dengan baik hingga kini.

"Sebagai bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku, golongan, agama, ras, latar belakang yang berbeda-beda, dengan puluhan ribu pulau yang terbentang, semuanya tetap bersatu padu, bahu membahu, satu jiwa, satu tekad



FOTO: IST/PDT

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menjadi Inspektur Upacara Apel Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

menjadi bagian dari NKRI yang kita cintai," tutur Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu.

Menurut Gus Imin, Pancasila disusun para bapak bangsa bukan untuk satu golongan, etnis, maupun agama tertentu, melainkan untuk seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu dalam kesempatan tersebut juga mengajak seluruh yang lapisan masyarakat untuk terus menjaga dan mengamalkan asas-asas Pancasila.

"Dari OKU Timur saya serukan mari terus jaga Asas Pancasila menjadi kebersamaan bahwa Pancasila adalah karya anak bangsa dan Pancasila milik seluruh anak bangsa. Pancasila adalah garda depan seluruh anak bangsa, bukan

milik segolongan saja, bukan milik sekelompok saja, tetapi milik seluruh warga bangsa dari seluruh wilayah Tanah Air kita," tegasnya.

Di sisi lain, Gus Imin menambahkan, Pancasila sebagai ideologi bangsa berperan besar dalam meneguhkan tekad dan cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan negeri makmur, adil dan sentosa.

Selain diikuti oleh puluhan ribu Kader Penggerak NU, Apel Kebangsaan ini juga dihadiri oleh ribuan kader Muslimat NU. Nampak pula sejumlah instruktur nasional PKPNU dan tokoh NU, antara lain KH. Mun'im DZ, KH. Adnan Anwar, Zaini Rahman, Hanif Dhakiri, Ramlan Holdan, serta Bertu Merlas.

**uc/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# TB Hasanuddin Soroti Kecilnya Anggaran Penegakan Hukum Kemlu

**A**nggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk mengupayakan peningkatan anggaran penegakan hukum. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, diketahui anggaran penegakan hukum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri tahun 2024 hanya sebesar Rp7,5 miliar.

Sebab itu, ia berharap pembahasan peningkatan anggaran, salah satunya pada tersebut bisa dibahas lebih lanjut usai Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada 16 Agustus mendatang. "Nanti kesempatan yang lebih detail setelah pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus. Sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut soal

penegakan hukum mengapa hanya Rp7,5 miliar, yang lain-lain nanti kita (juga) diskusikan," tutur Hasanuddin di Jakarta, Selasa (6/6).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia ketika Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Proposal Perdamaian untuk Ukraina dan Rusia dalam *International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20* pada Sabtu (3/6/2023) lalu. Peristiwa tersebut menjadi perhatiannya lantaran muncul penolakan dari Kementerian Pertahanan Ukraina dan Kementerian Luar Negeri Ukraina

Oleh karena itu, Hasanuddin berharap pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga yang mewakili agar saling berkonsolidasi. Hal ini menjadi krusial supaya poin

yang disampaikan dalam forum dunia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sekaligus dekat dengan realita yang terjadi saat ini. "Image-nya jadi kurang baik. Pertama, dianggap tidak tahu lapangan. Kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," pungkasnya. — **ts,frs/rdn**

”

**IMAGE-NYA JADI KURANG BAIK. PERTAMA, DIANGGAP TIDAK TAHU LAPANGAN. KEDUA, KITA MASUK PADA RANAH-RANAH YANG SESUNGGUHNYA KURANG TEPAT DAN ITU SANGAT MERUGIKAN POLITIK LUAR NEGERI KITA**

Scan QR untuk berita selengkapannya



FOTO: FHN/PDT



Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

# Rayakan 60 Tahun, Komisi I Sepakat Perkuat Kerja Sama Diplomasi dengan Jepang

**K**omisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) Dubes Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. Kunjungan tersebut digelar dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama bilateral dalam rangka peringatan 60 Tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang.

Disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah, dalam pertemuan ini sejumlah penguatan hubungan lewat kesepakatan ekonomi, pendidikan, budaya, dan menjadi momen untuk mempererat persahabatan antar kedua negara.

"Kerja sama (nantinya akan) macam-macam. Ada

kerja sama pendidikan, ekonomi, ada peningkatan-peningkatan pembangunan investasi di Indonesia dari Jepang. Hal inilah yang harus kita dorong dan kedatangan Pak Dubes itu juga untuk menegaskan hal-hal

”

**TAHUN INI, KITA MERAYAKAN 60 TAHUN HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA JEPANG DAN INDONESIA. TAHUN INI, MENJADI MILESTONE YANG SANGAT PENTING.**

tersebut," ungkap Dave kepada **Parlementaria** usai pertemuan di Senayan, Jakarta, Senin (5/6).

Dubes Kanasugi menambahkan adanya peningkatan hubungan yang signifikan salah satunya dikuatkan antara perusahaan Jepang dan Indonesia di berbagai bidang. Hal ini berpotensi meningkatkan pencapaian di tahun ini.

"Tahun ini, kita merayakan 60 tahun hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia. Tahun ini, menjadi *milestone* yang sangat penting. Di sini, bagi kami, kami harus meningkatkan hubungan termasuk melalui bidang ekonomi, bidang keamanan politik, juga perubahan budaya. Jadi saya menantikan kerja sama di tahun ini," tandasnya.

frs,ts/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah saat menerima Dubes Jepang di Ruang Tamu Banggar Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

# Perjuangkan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK, Junimart Girsang Buka Ruang Pengaduan Online

**S**ebagai bentuk komitmennya dalam memperjuangkan pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, membuka layanan ruang pengaduan bagi para honorer yang masih belum diakomodir pemerintah pengangkatannya sebagai PPPK.

"Saya mengamati terlalu banyak hingga saat ini tenaga honorer yang mengeluhkan nasib mereka melalui sejumlah komentar di medsos saya, karena itu saya sediakan ruang khusus bagi seluruh tenaga honorer untuk mengadukan masalah mereka di <https://halojg.id/lapor/> sekarang silahkan buat laporannya, kita akan perjuangkan," ujarnya dalam keterangan yang diperoleh **Parlementaria**, Selasa (30/5).

Lebih lanjut dikatakannya, setiap laporan yang nantinya diterima melalui ruang online dapat diklik di <https://halojg.id/lapor/> akan didorong untuk masuk dalam daftar pengangkatan tenaga PPPK sebelum 28 November 2023 mendatang oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Jadi jangan gagal paham, yang harus diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah itu adalah seluruhnya, sekali lagi saya ulangi seluruh tenaga honorer harus diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah pada tahun ini, mulai dari *cleaning service*, tenaga administrasi, keamanan, satpol PP dan banyak lagi. Semua harus diangkat dan terealisasi paling lama 28 November 2023," jelasnya.

Karenanya Junimart berpendapat, berpedoman kepada prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui PPPK. Maka kemungkinan besar jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah di tahun ini akan mencapai jumlah sekitar 5 juta tenaga honorer.

"Menurut saya jumlahnya akan meningkat menjadi 5 juta, mengapa? karena data 2.360.363 yang dimiliki Kemenpan RB masih belum mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada. Dan hal inilah yang kita perjuangkan agar tidak ada tenaga honorer yang tidak ikut diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah," tegas politisi daerah pemilihan Sumatera Utara III (Sumut III) itu. **aha**

**Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.**

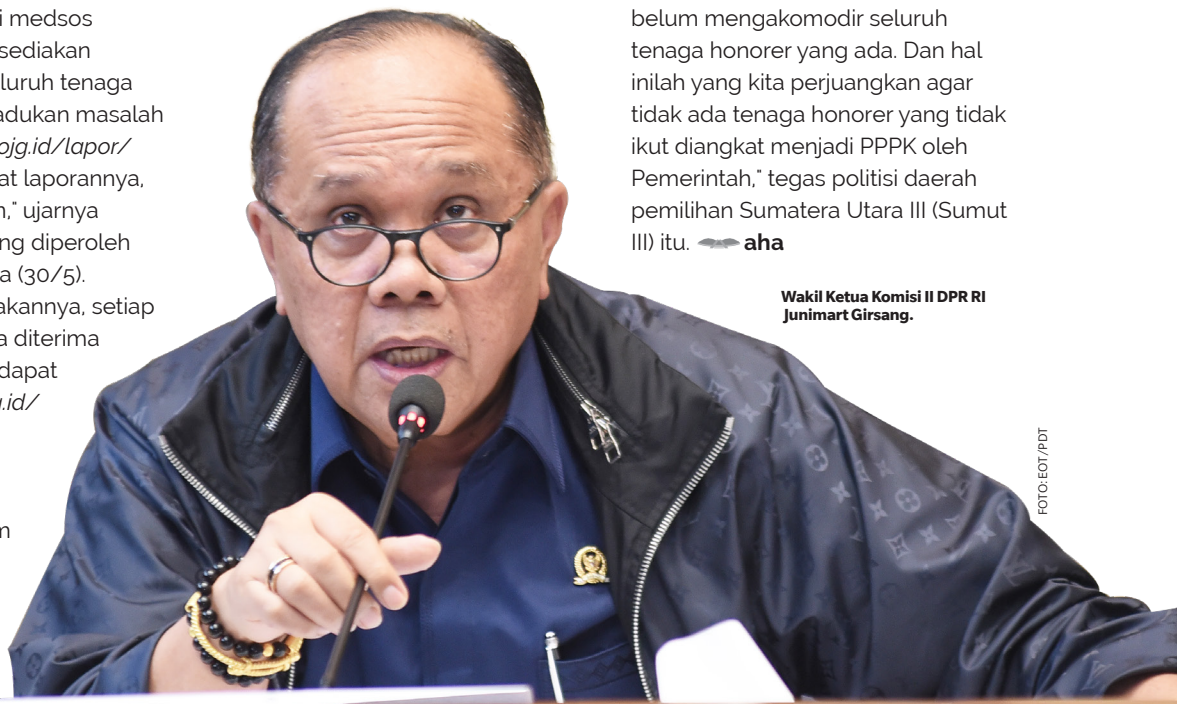


FOTO: EOT/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Siti Nurizka Dukung Usulan LPSK tentang Dana Bantuan Korban Diatur dalam PP

**A**nggota Komisi III DPR RI Siti Nurizka Puteri Jaya mendukung rencana Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mengusulkan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Bantuan Korban. RPP tersebut memuat tentang mekanisme dan pengaturan dana bantuan bagi korban yang ditangani oleh LPSK. Dengan adanya PP ini, ia berharap dapat membantu memastikan korban mendapatkan haknya.

"Saya sangat setuju dengan LPSK untuk mengusulkan mekanisme dan pengaturan dana bantuan korban dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang dana bantuan korban. Saya sebagai perwakilan wanita (di) Komisi III mendukung penuh segala mekanisme penganggaran untuk tercapainya segala hak-hak untuk korban," jelas Rizka dalam

rapat Komisi III dengan Ketua LPSK dan Ketua Komnas HAM di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, (6/6).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengatakan, dengan adanya PP nantinya juga dapat menguatkan UU TPKS. Sebab, UU itu membuka kesempatan bagi korban mendapat haknya. "Seperti yang kita tahu berita akhir-akhir ini bermunculan tentang kekerasan seksual adalah tindakan keji yang sangat memalukan dan berdampak besar bagi para korban khususnya perempuan dan anak. Undang-Undang TPKS telah membuat satu langkah maju dengan membuka kesempatan bagi korban mendapat haknya. Langkah selanjutnya yaitu memastikan hak tersebut sampai ke tangan para korban," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, dalam rapat ini, Rizka juga mempertanyakan pelaksanaan Program Sahabat Saksi

dan Korban di dapilnya, Sumatera Selatan I. Ia berjanji akan mendukung penuh terkait alokasi dan anggaran program tersebut.

"Meningat di daerah saya banyak terjadi kriminalisasi korban, kemarin pun sudah saya angkat dalam rapat Komisi III, begitu banyaknya korban yang dikriminalisasi dan malah menjadi tersangka. Agar kiranya peran LPSK dapat lebih berkembang lagi di daerah Sumatera Selatan," tutupnya.

[we,au/rdn](https://www.weau.rdn)

”

**SAYA SANGAT SETUJU DENGAN LPSK UNTUK MENGUSULKAN MEKANISME DAN PENGATURAN DANA BANTUAN KORBAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA BANTUAN KORBAN.**

Anggota Komisi III DPR RI Siti Nurizka Puteri Jaya.



FOTO: JKA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Perkuat Pengamanan Pemilu 2024, Legislator Dukung Tambahan Anggaran Polri

**A**nggota Komisi III DPR RI Heru Widodo mendukung penuh penambahan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu terutama dalam penguatan aspek pengamanan jelang persiapan Pemilu 2024, yang meliputi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar secara serentak.

Hal itu dipaparkan Heru saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri Gatot Eddy beserta

segenap jajaran Polri. Raker ini dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan RKP K/L Tahun 2024 yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).

"Jangan sampai karena persoalan anggaran tapi pesta demokrasi kita berantakan karena tidak ada pengamanan, kekurangan anggaran, dan lain sebagainya. Saya kira dengan melihat kebutuhan

Polri hari ini terutama menjelang 2024, saya yakin tidak ada kata keraguan sedikit pun dalam hal mendukung anggaran ini, baik dari sisi pagu

indikatif sampai nanti bahkan definitif," ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Berkaca dari Pilpres 2014 dan 2019, ungkap Heru, kedua Pemilu tersebut meninggalkan bekas traumatik yang begitu luar biasa. Di mana pada saat itu masyarakat Indonesia sempat menjadi terbelah karena perbedaan pandangan dan pilihan politik. "Nah saya kira 2024 kami tidak ingin terjadi lagi. Maka ini perlu disiapkan sumber daya yang lebih baik dalam hal pengamanan dari Polri karena Polri ini memiliki peran yang sangat sentral atas keberlangsungan demokrasi kita," tandas Heru.

Selain itu, Heru juga menyayangkan adanya penurunan anggaran Polri dari hasil pengajuan pagu indikatif dari tahun 2023 yaitu sebesar Rp11,7 Triliun. Padahal, hal itu justru seharusnya ditambah. Oleh karena itu, Heru meminta Pemerintah melalui Kemenkeu harus mempertimbangkan serius penambahan anggaran Polri sebagaimana telah diusulkan oleh Polri sebesar Rp 49 Triliun.

"Saya kira ini demi keberlangsungan demokrasi kita berjalan dengan baik berjalan dengan aman, Komisi III saya kira akan terus mendorong terkait dengan penambahan anggaran dan pasti ini akan disampaikan oleh Pimpinan Fraksi lainnya bahwa Polri hari ini harus diperkuat. Kita tidak mau nanti di 2024 kemudian pesta demokrasi kita berantakan karena persoalan pemangkasan anggaran atau penurunan anggaran," pungkas Legislator Dapil Kalimantan Selatan II tersebut.



FOTO: RSB/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri Gatot Eddy. Raker ini dalam rangka pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

# Suhardi Duka: Anggaran Kecil, Bapanas Harus Efektif untuk Program 2024

**A**nggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyoroti pagu indikatif tahun anggaran 2024

Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp441.617.725.000. Melihat kecilnya anggaran yang diberikan Menteri Keuangan kepada Bapanas, Suhardi Duka menilai Bapanas perlu perencanaan yang lebih efisien dan efektif untuk program 2024 agar jangkauannya kuat di masyarakat.

"Anggaran ini tidak banyak memang. Tentu kalau Rp1,2 triliun juga terlalu banyak, tapi Rp441 miliar

”

**ANGGARAN INI TIDAK BANYAK MEMANG. TENTU KALAU RP1,2 TRILIUN JUGA TERLALU BANYAK, TAPI RP441 MILIAR INI TIDAK CUKUP MEMANG. OLEHNYA ITU MEMANG PERLU PERENCANAAN YANG LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF.**

ini tidak cukup memang. Olehnya itu memang perlu perencanaan yang lebih efisien dan efektif. Agar jangkauannya kuat di masyarakat," ujarnya di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (5/6).

Menurutnya, Bapanas harus mengurangi biaya administratif. Contohnya pada penyusunan program prognosa pangan sebesar Rp12,5 miliar. Ia menilai perlu lebih efisien. Politisi Fraksi Partai Demokrat itu lebih mendorong pengalokasian anggaran terhadap program seperti pengendalian kerawanan pangan dan bantuan pangan untuk generasi emas, dibanding program yang sifatnya administratif yang sifatnya tidak bisa diukur.

"Ini kan bantuan pangan untuk generasi emas juga untuk menangani stunting. Kerawanan pangan, bagaimana suatu daerah tiba-tiba bencana seperti dilanda paceklik dan sebagainya. Di situ lah barangkali ada stok bahan pangan selain BNPB, selain Bulog, Badan Pangan Nasional turun tangan," ujarnya legislator dapil Sulawesi Barat itu.

Dengan program yang lebih banyak menjangkau masyarakat ini, keberadaan Bapanas diharapkan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. "Sehingga demikian badan pangan nasional turun tangan, badan pangan nasional ini terasa keberadaannya di tengah kedua kementerian, Kementerian Pertanian dan Perdagangan, ada Badan Pangan Nasional di tengah-tengahnya untuk memberikan aplikasi nyata ke masyarakat kita," pungkasnya.

gal/rdn



FOTO: AFR/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Kepala Badan Pangan Nasional di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pemerintah Perlu Serius Bantu Budidaya Talas Beneng guna Cegah Krisis Pangan

**A**nggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo minta pemerintah serius bantu budidaya talas beneng untuk cegah krisis pangan dengan cara memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Serang. Pasalnya, talas beneng ini telah diinisiasi oleh warga yang bernama Ibu Ruly yang masih perlu dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

"Budidaya talas beneng ini sangat *surprise* dalam membantu salah satu kebutuhan bahan pangan pokok, artinya bahwa talas beneng ini memiliki prospek yang sangat bagus untuk mengatasi krisis pangan yang

sudah di depan mata. Kami minta pemerintah harus dukung hal itu agar lebih optimal," Firman usai memimpin kunjungan kerja spesifik di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (29/5).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan telah ada himbauan dari

”

**BUDIDAYA TALAS BENENG INI SANGAT SURPRISE DALAM MEMBANTU SALAH SATU KEBUTUHAN BAHAN PANGAN POKOK.**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa jumlah penduduk dunia akan mengalami peningkatan sampai 9,7 Miliar di tahun 2050 dan Bappenas sendiri telah merilis pada tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia dari 274 juta menjadi 300 juta penduduk artinya krisis pangan sudah didepan mata.

"Untuk itu Indonesia yang memiliki keanekaragaman pangan harus dioptimalkan namun tentunya ini harus ada keseriusan dari semua pihak, baik pemerintah dan juga masyarakat. Kami berharap kedepan budidaya talas beneng ini jadi *pilot project*," pungkas Politisi Dapil Jawa Tengah III itu. ➡ **cas/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo saat memimpin kunjungan kerja spesifik di Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (29/5/2023).

FOTO: CUS/PDT

# Komisi V Siap Perjuangkan Peningkatan Anggaran Basarnas

**K**omisi V DPR RI bersama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional sesuai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 di DPR RI.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BNPP/Basarnas, dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Hapsem BPK RI Semester I Tahun 2022 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2024 yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (30/5).

”

**KOMISI V DPR RI SEPAKAT DENGAN BNPP/BASARNAS UNTUK MENYESUAIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSKALA NASIONAL DALAM RAPBN TA 2024.**

”Komisi V DPR RI sepakat dengan BNPP/Basarnas untuk menyesuaikan program dan kegiatan berskala nasional dalam RAPBN TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17

Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” ujar Ridwan

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BNPP/Basarnas atas capaian opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022.

“Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta BNPP/Basarnas untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan saran masukan Komisi V DPR RI.

Komisi V DPR RI meminta BNPP/Basarnas untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2023 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI,” tandas Ridwan.

— pun/aha



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BNPP/Basarnas, di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (30/5/2023).



# Legislator Serukan Kementerian Desa Fokus Entaskan Daerah Tertinggal

**A**nggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid menyerukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk kedepannya tidak ada lagi daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Dirinya menginginkan Kementerian Desa memberi prioritas khusus untuk bekerja lebih keras dan lebih fokus lagi dalam mengentaskan daerah-daerah yang masih dalam kategori daerah tertinggal.

"Sekalipun saya juga paham bahwa tidaklah menjadi kunci utama keberhasilan kita mengangkat daerah-daerah dari Daerah Tertinggal itu hanya dengan kerja sebuah Kementerian saja. Tapi ini tentu kerja semua kerja bareng semuanya tapi saya ingin bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberi prioritas khusus bagaimana kita lebih keras dan lebih fokus lagi dalam mengentaskan daerah-daerah kita yang masih dalam kategori Daerah tertinggal," ujar Anwar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (30/5).

Anwar mencontohkan, di Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat tiga kabupaten yang

hingga per hari ini masuk kategori daerah tertinggal. "Mudah-mudahan ini juga sebenarnya Pak Menteri, ini sebuah hal yang memalukan juga, kalau daerah Sulteng itu daerah yang tujuan investasi yang begitu besar tapi masih ada daerah tertinggal. Saya ingin juga mudah-mudahan ini mendapat perhatian, kita coba membedah bersama-sama, kenapa masih ada istilah Daerah Tertinggal itu," tandas Anwar.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan Kementerian Desa dan PDTT untuk kedepannya semakin meningkatkan alokasi dana desa menjadi prioritas utama yang lebih besar lagi. "Karena bagaimanapun juga sekarang ini desa kita ini, alhamdulillah berkat binaan Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri, baik di sisi administrasi pemerintahannya sekarang ini sudah jauh lebih baik, Pak Menteri," tandas Anwar.

Pengelolaan dana desa, sambungnya, hanya akan berdampak *multiplier effect* jika alokasi dana desa tersebut langsung mengenai

ke kas-kas desa. "Saya kira akan jauh berbeda *multiplier effect* yang terjadi ketika dana alokasi desa ini ditingkatkan dari sekarang. Tentu ini butuh perjuangan kita semua dan panglimanya tentu pak menteri untuk kita berjuang kepada bapak Presiden sehingga 2024 di akhir masa jabatan presiden, bisa memberikan hadiah terbaik buat desa di Indonesia, dengan memberikan alokasi dana desa yang cukup signifikan dari kondisi yang ada sekarang. Saya kira itu amanah UU Desa," tutupnya.

— pun,yas/aha



FOTO: ENO/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

# Komisi VI Setujui Pagu Indikator Kementerian BUMN Sebesar Rp255 Miliar

**K**omisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 255 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp 185 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp70 miliar.

Selain pagu indikatif tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp 56 miliar. "Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (5/6).

Lebih lanjut, untuk usulan Penerimaan Modal Negara (PMN) Kementerian BUMN tahun 2023, Aria Bima mengatakan Komisi VI akan mendalami usulan PNM tahun anggaran 2023 yang berasal dari Alokasi Pembiayaan Cadangan Investasi APBN 2023 tersebut. Adapun usulan PNM tersebut terdiri dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3.000 miliar untuk penyelesaian pengalihan Polis Jiwasraya.

"PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey sebesar Rp1.193 miliar dalam rangka pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dan Sanur, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)



FOTONO/PDT  
Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

sebesar Rp1.000 miliar dalam rangka risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri, PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp500 miliar dalam rangka investasi dan modal kerja," papar Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat.

Selanjutnya, untuk PNM tahun anggaran 2024, Komisi VI juga akan mendalami usulan PNM untuk 8 BUMN. Dengan rincian, PT PLN sebesar Rp10 miliar, PT Utama Karya sebesar Rp10 miliar untuk pendanaan masa operasi dan Rp12,5 miliar untuk penyelesaian ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi

dan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp3 triliun untuk kapasitas pinjaman KUR, Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.

PT KAI sebesar Rp3 triliun, PT Rekayasa Industri Rp2 triliun, PT RNI sebesar Rp1,9 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun. Sedangkan usulan PMN Non Tunai tahun anggaran 2024 dari Kementerian BUMN diusulkan untuk PT LEN Industri sebesar Rp 649 miliar dan PT Varuna Tirta Prakasa sebesar Rp24,13 miliar.

bia/rdn

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Martin Manurung: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Lebih Banyak Risiko Negatif

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai kebijakan ekspor pasir laut lebih banyak berisiko negatif. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Salah satu yang perlu dikaji adalah dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Apalagi, sebelumnya sudah ada pelarangan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003.

"Kita lihat para pemerhati lingkungan juga sudah bersuara untuk penolakan PP ini. Artinya ini jelas ancaman yang nyata terhadap lingkungan kita," ujar Martin lewat keterangan pers yang diterima **Parlementaria** di Jakarta, Minggu (4/6).

Dia menjelaskan, ekspor diperbolehkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Namun, Martin mempertanyakan cara pengawasannya yang masih belum jelas. "Demi keselamatan lingkungan serta yang lainnya, kami minta (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023) dikaji ulang," ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menekankan tentang

”

**KITA LIHAT PARA PEMERHATI LINGKUNGAN JUGA SUDAH BERSUARA UNTUK PENOLAKAN PP INI.**

Dasar Hukum Pemanfaatan Hasil Sedimentasi, khususnya pasir laut, dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan kepentingan negara.

Trenggono menjelaskan, selama ini, kebutuhan reklamasi dalam negeri besar. Sayangnya, pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau.

Dia menilai, pasir sedimentasi cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan IKN dan infrastruktur

dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau *domestic market obligation* (DMO). Pemerintah menetapkan peraturan itu dengan tujuan untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri.

"Kalau ini didiamkan dan tidak diatur maka bisa jadi (pasir) pulau-pulau diambil, jadi reklamasi dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Atas dasar itu terbitlah PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus gunakan pasir sedimentasi," ujar Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu lalu (31/5) lalu.

— **bia/rdn**

**Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung.**



FOTO: OJI/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi VII Minta Pemerintah Akuisisi PT Vale Indonesia (INCO)



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat Rapat Kerja bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (5/6/2023).

**K**omisi VII DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemberian perpanjangan izin kontrak PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan berakhir pada 2025 mendatang. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengungkapkan, salah satu pertimbangannya yakni terkait komposisi saham Vale Indonesia saat ini. Menurutnya, sebanyak 20 persen saham Vale Indonesia yang dilepas ke publik mayoritas justru dikuasai pihak asing.

"Infonya itu yang memiliki saham 20 persen mereka-mereka juga bahkan itu terindikasi dana pensiun Sumitomo padahal Sumitomo sudah memiliki saham yang tercatat di Vale," kata Bambang dalam Rapat

”

**INFONYA ITU YANG MEMILIKI SAHAM 20 PERSEN MEREKA-MEREKA JUGA BAHKAN ITU TERINDIKASI DANA PENSUN SUMITOMO PADAHAL SUMITOMO SUDAH MEMILIKI SAHAM YANG TERCATAT DI VALE.**

KERJA bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (5/6)

Bambang pun meminta pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan saham 51 persen PT Vale

Indonesia Tbk (INCO) secara penuh sebagai syarat perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari saat ini masih berstatus Kontrak Karya (KK).

Seperti diketahui, untuk mendapatkan proses perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maka setidaknya Vale wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen kepada investor nasional atau pemerintah. Namun berdasarkan catatannya, perusahaan baru mendivestasikan sahamnya sebesar 20 persen ke MIND ID. Artinya, apabila Vale hanya menawarkan sahamnya sebesar 11 persen untuk diambil negara, maka sejauh ini baru 31 persen saham yang digenggam RI.

Hal ini lantaran kepemilikan publik sebesar 20,7 persen di PT Vale Indonesia ternyata tidak dikuasai oleh pasar domestik. "Mereka (Vale) pakai perusahaan cangkang domestik infonya itu yang memiliki saham 20 persen. Mereka juga bahkan terindikasi itu Dana Pensiun Sumitomo," kata Bambang.

Bambang menambahkan, Sumitomo sendiri sudah memiliki saham yang tercatat di PT Vale Indonesia. Karena itu ia mendorong proses divestasi saham PT Vale melalui MIND ID sebesar 20 persen. Sehingga RI mengantongi kepemilikan saham 51 persen secara penuh. "Harapan kami bahwa posisi 51 persen, 20 persen plus 11 persen yang sedang ditawarkan. Kami koordinasi dengan Komisi VI mereka bilang mendukung bahkan siap meminta ke Menteri Keuangan untuk penyertaan modal negara apabila diperlukan untuk pengambilalihan Vale," tandasnya. **ann/aha**





# Diah Pitaloka: Anggaran Kementerian PPPA Rp288 Miliar Terlalu Kecil



FOTO: EOT/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6/2023).

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyoroti anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rp288 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan perlindungan perempuan dan anak.

"Anggarannya terbilang cukup kecil, sekitar Rp288 Miliar yang menjadikan salah satu anggaran

kementerian terkecil. Saya ingin mengeksplorasi bagaimana pola kerja Bu Menteri untuk melakukan advokasi anggaran yang menjadi kebutuhan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sehingga muncul solusi atau sebetulnya memang masih butuh penguatan anggaran," kata Diah saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/6).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, Kementerian PPPA perlu melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga

lain. Beberapa diantaranya dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, termasuk Polri serta KPAI untuk menangani maraknya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak.

"Karena yang bersangkutan ini menteri koordinator, kita ingin melihat progres kerjasama antar kementerian di pemerintah dan antar lembaga tentunya. Ada KPAI, komunitas antar perempuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi perhatian kita semua menyangkut perempuan dan anak," imbuh Diah. **tn/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Irma Suryani Tegaskan Pembahasan RUU Kesehatan Jalan Terus

**A**nggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menerima aspirasi beberapa organisasi profesi bidang kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin (5/6/2023). Irma menegaskan pembahasan RUU kesehatan harus tetap dilanjutkan. Adapun organisasi profesi yang hadir di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Mereka meminta pembahasan RUU Omnibus Kesehatan dihentikan.

"Apa yang menjadi keberatan, masukan, bahkan kekhawatiran teman-teman mengenai RUU Kesehatan akan saya sampaikan ke

Panja Komisi IX," ujar Irma dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Senin (5/6).

Irma mengakui draf RUU Kesehatan belum final karena masih dalam tahap pembahasan. Draf tersebut akan terus diperbaiki dengan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan. "Betul mungkin ada beberapa yang kalian merasa UU ini tidak cocok atau ada kabar negatif yang tersebar ke masyarakat. Nanti kita bahas, sama-sama kita bicarakan," tandasnya.

Meski ada ruang perbaikan, Irma mengaskan bahwa pembahasan RUU Kesehatan tidak bisa dihentikan sebagaimana tuntutan organisasi profesi tersebut. "Tapi yang perlu digarisbawahi, DPR tidak akan menyetop pembahasan RUU

ini, karena UU ini dibutuhkan," tegas Irma.

Legislator Partai NasDem dari Dapil Sumatra Selatan II itu mengatakan, RUU Kesehatan bertujuan untuk memperbaiki sektor kesehatan nasional secara menyeluruh. Ia juga memastikan bakal *beleid* itu jauh dari isu yang beredar tentang liberalisasi, diskriminasi, dan kriminalisasi tenaga kesehatan.

"Saya lugas orangnya, blak-blakan. Kemarin RUU Kesehatan mau dibahas di Baleg, saya teriak, karena memang harusnya ini tupoksi Komisi IX. Akhirnya terjadi komunikasi, lalu pembahasan di Komisi IX. Ada jalan untuk mencapai prinsip kesetaraan, *fairness*, yang Partai NasDem selalu perjuangkan," tukas Irma. **bia/rdn**



FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani saat menerima aspirasi beberapa organisasi profesi bidang kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin (5/6/2023).



# Kris Dayanti Berharap Masyarakat yang Butuh Darah Bisa Mudah Mendapatkannya

**A**nggota Komisi IX DPR RI sekaligus Duta Donor Darah Parlemen, Kris Dayanti berharap agar masyarakat yang membutuhkan darah di PMI (Palang Merah Indonesia) bisa mendapatkannya dengan mudah dan gratis alias tidak dikenakan biaya apapun.

"Saya yakin sebagian besar pendonor darah ini secara suka rela dan penuh keikhlasan mendonorkan darahnya. Sementara ketika masyarakat yang butuh darah harus membayar sekitar 300 ribuan. Sebagai Anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan saya berharap agar ke depan semua warga negara bisa dengan mudah mendapatkan darah, tanpa harus dikenai biaya alias gratis," papar Kris Dayanti usai mendonorkan darahnya di kegiatan Donor darah kerjasama Korpri Setjen DPR RI dengan Keluarga Sehat Donor Darah (KSDD) DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengakui bahwa sejatinya biaya sebesar 300 ribuan yang dikenakan pada masyarakat yang ingin mendapatkan darah di PMI itu bukan termasuk bentuk komersil. Melainkan untuk biaya penggantian pengolahan darah (BPPD). Namun ia berharap ke depan ada anggaran atau dana tersendiri dari negara bagi PMI yang diperuntukan membiayai kegiatan tersebut. Sehingga hal tersebut tidak dibebankan kepada masyarakat.

Lebih lanjut politisi yang juga seorang diva pop tanah air ini mengajak seluruh masyarakat

untuk tidak ragu mendonorkan darahnya. Pertama, selain menjadi salah satu langkah mulia yang bisa menyelamatkan nyawa manusia, donor darah juga membawa banyak manfaat bagi pendonor itu sendiri. Dimana setelah 48 jam mendonorkan darahnya, maka sel-sel darah merah dalam tubuh pendonor akan merepair dengan baik. Sehingga menghasilkan sel-sel darah baru lagi. Dengan begitu tubuh akan terasa lebih segar, sehat dan awet muda.

"Alhamdulillah dalam catatan PMI saya sudah enam kali mendonorkan darah saya di PMI. Dan tidak ada keluhan apapun setelah itu. Saya masih tetap bisa menjalankan berbagai aktivitas saya. Bahkan saya merasa lebih segar dan sehat setelah mendonorkan darah saya. Oleh karena itu saya berharap masyarakat untuk tidak ragu lagi dalam mendonorkan darahnya," pungkas Duta Donor Darah Parlemen ini. [ayu/aha](#)



FOTO: FRN/PDI

Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti usai mengikuti kegiatan Donor darah kerjasama Korpri Setjen DPR RI dengan Keluarga Sehat Donor Darah (KSDD) DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Scan QR untuk berita selengkapannya



# Rano Karno Minta Kemenparekraf Tepis Berita Wisatawan Asing Nakal

**K**asus wisatawan asing nakal akhir-akhir ini kerap terjadi terutama di daerah pariwisata Bali. Melihat itu, Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk berupaya menepis pemberitaan-pemberitaan negatif yang terjadi akibat kelakuan wisatawan asing nakal ini. Karena dikhawatirkan dapat menghancurkan kepariwisataan Indonesia.

"Tentu sebagai orang media, kita memantau. Apalagi yang dipantau ini bidang yang kita kuasai yaitu *tourism*."

”

**TENTU SEBAGAI ORANG MEDIA, KITA MEMANTAU. APALAGI YANG DIPANTAU INI BIDANG YANG KITA KUASAI YAITU *TOURISM*. BELAKANG INI DI MEDIA SOSIAL TERUTAMA, BANYAK SEKALI KEGIATAN *TOURISM*, PARA *TOURISM* INI MELAKUKAN *BAD NEWS*.**

Belakang ini di media sosial terutama, banyak sekali kegiatan *tourism*, para *tourism* ini melakukan *bad news*," tuturnya di dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menparekraf/Kepala Barekraf RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Baru-baru ini misalnya, dunia jagat maya dihebohkan dengan pemberitaan adanya video terkait warga negara asing wanita asal Jerman yang melakukan tindakan tidak pantas seperti bertelanjang di sebuah pertunjukan tari di Pura Saraswati Ubud, Gianyar, Bali. Karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu meminta Kemenparekraf untuk lebih responsif dalam menindak lanjuti pemberitaan negatif ini. Jika perlu membuat satu tim deputi khusus.

"Jadi, saya cuman berpikir, mudah-mudahan ini hanya tindakan pribadi ya. Tapi yang saya khawatirkan kalau ini sebuah tindakan *organize*. Nah ini *impact*-nya sangat luar biasa di tengah persaingan. Jadi saya ingin mengingatkan kita agar minimal kementerian ada *statement* untuk meng-*counter* berita-berita seperti itu," ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno pun menyampaikan akan mendalami usulan tersebut karena memang persoalan ini perlu untuk diantisipasi. Dirinya juga menyatakan telah menerima video terkait wisatawan asing nakal tersebut. "Dan Kemenparekraf juga akan memastikan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan baik *Do's and Don't's* bukan hanya di Bali namun juga pariwisata lain," ujar Menteri Sandiaga. [gal/rdn](https://www.gal/rdn)

Anggota Komisi X DPR RI  
Rano Karno.



FOTO: DEP/PTT



# Legislator Dorong Kemenpora Kolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga Lain

**A**nggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam peningkatan program-program kepemudaan. Dengan kolaborasi aktif antar kementerian/lembaga tersebut, Kemenpora diharapkan dapat menjadi leading sektor dalam program-program kepemudaan yang ada.

**”KITA TAHU DARI TAHUN KE TAHUN ANGGARAN PEMUDA CEKAK RP161 MILIAR SAJA, TETAPI PUNYA BEBAN YANG SANGAT LUAR BIASA. OLEH KARENA ITU SAYA BERHARAP SEKALI BAGAIMANA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA INI MEMPU MEMAINKAN JURUS-JURUS ATAU STRATEGI-STRATEGI YANG MUMPUNI**

Anggota Komisi X DPR RI  
Fahmi Alaydroes.

”Kita tahu dari tahun ke tahun anggaran pemuda cekak Rp161 miliar saja, tetapi punya beban yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya berharap sekali bagaimana Kemenpora ini mampu memainkan jurus-jurus atau strategi-strategi yang mumpuni di tengah-tengah cekaknya anggaran,” ujar Fahmi dalam rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Selain dengan kementerian/ lembaga, kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dan organisasi masyarakat (Ormas) kepemudaan juga dinilai menjadi salah satu langkah efektif yang bisa diperkuat Kemenpora agar target-target program kepemudaan dapat tetap berjalan maksimal dengan anggaran yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi prestasi Tim Sepakbola Indonesia yang berhasil menyabet emas dalam Sea Games 2023. Fahmi pun mendorong agar sektor olahraga dapat terus menciptakan prestasi-prestasi gemilang kedepannya.

”Saya pikir, Sea Games ini kalau bisa benar-benar menjadi modal buat Pak menteri dan jajaran untuk terus menerus membina olahraga kita, sehingga membanggakan. Setidak-tidaknya di level Asia saja itu sudah sangat luar biasa,” harapnya. **bia/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: DEP/POD

# Komisi XI Sepakat Slamet Hadi Purnomo Jadi Anggota BPK Terpilih 2023-2028

**K**omisi XI DPR RI menyepakati Slamet Eddy Purnomo sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih tahun 2023-2028. Slamet mengantongi suara terbanyak di antara calon lainnya pasca pemungutan suara setelah rangkaian uji kelayakan dan kepatutan. Nantinya Slamet akan menggantikan tugas Agus Joko Pramono yang akan berakhir Agustus mendatang.

"*Bismillahirrahmanirrahim*, dengan ini Slamet hadi Purnomo, S.E., MM sebagai anggota BPK terpilih 2023-2028 untuk itu akan kita tindak lanjuti dengan surat kepada pimpinan DPR, kepada ketua DPR untuk dikirimkan namanya kepada presiden," ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta pada Rabu (31/5).

Komisi XI DPR RI sendiri telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan bagi 12 calon anggota BPK dalam tiga hari berturut-turut sejak Senin (29/5) hingga Rabu (31/5) lalu. Setelah seluruh calon anggota melakukan pemaparan gagasan dalam uji kelayakan dan kepatutan, Komisi XI DPR RI mengadakan rapat internal yang dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Penghitungan suara untuk pemilihan anggota BPK terpilih ini dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh media. Dari 56 suara yang masuk, Slamet Eddy Purnomo berhasil meraup 32 suara meninggalkan rivalnya Dumoly Freddy Pardede yang meraih 24 suara.

Sebelum dikirim ke Presiden RI, nama anggota BPK terpilih akan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR melalui rapat Paripurna. Setelah disetujui dalam rapat paripurna, Ketua DPR akan mengirimkan surat resmi kepada presiden mengenai nama anggota BPK terpilih. Anggota BPK terpilih tersebut baru bisa melaksanakan tugas bersama Pimpinan BPK lainnya setelah melakukan pengambilan sumpah jabatan.

Rangkaian pemilihan Anggota BPK ini telah dimulai sejak Maret 2023 silam. Melalui rapat internal Komisi XI telah menetapkan 14 nama calon anggota BPK yang berhak mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan. Komisi XI DPR juga membuka masukan dari masyarakat terkait

calon anggota BPK yang ditutup pada 17 April.

Tahapan dilanjutkan setelah menerima surat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah yang berisi 13 nama calon anggota BPK. Di bulan Mei 2023, Komisi XI DPR RI menerima 1 surat pengunduran diri dari calon anggota BPK atas nama Dewi Yustiana yang menyisakan 12 nama lain dalam rangkaian uji kelayakan dan uji kepatutan calon anggota BPK.

uc/aha

Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir.



FOTO: MUN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Tak Sekadar Periksa Laporan, Komisi XI Harap BPK Ukur Kinerja Penggunaan Anggaran

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit berharap bahwa ke depan nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak sekadar melakukan pemeriksaan keuangan berdasarkan laporan. Ia mengungkapkan agar nantinya pemeriksaan BPK juga dapat mengukur kinerja penggunaan anggaran tersebut.

"Di luar daripada tugas-tugas reguler yang selama ini dilakukan oleh BPK yaitu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan lembaga negara. Maka yang kita inginkan adalah ke depan pemeriksaan BPK itu lebih bisa mengukur kinerja-kinerja dari anggaran. Itu yang kita ingin ditingkatkan ke depan," ujar Dolfie kepada **Parlementaria** setelah rapat Pengambilan Keputusan Calon Anggota BPK RI di gedung Nusantara 1, Senayan Jakarta pada Rabu (31/5).

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada 12 calon anggota BPK untuk mencari pengganti Agus Joko Pramono yang masa jabatannya akan berakhir Agustus mendatang. Setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama 3 tiga hari sejak Senin (29/5/2023) hingga Rabu (31/5/2023) lalu.

Dalam rapat internal pengambilan keputusan calon anggota BPK yang dilanjutkan dengan pemungutan suara, Komisi XI DPR RI menyepakati Slamet Eddy Purnomo sebagai



FOTO: MUN/PDT

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit saat rapat Pengambilan Keputusan Calon Anggota BPK RI di gedung Nusantara 1, Senayan Jakarta pada Rabu (31/5/2023).

”

**DI LUAR DARIPADA TUGAS-TUGAS REGULER YANG SELAMA INI DILAKUKAN OLEH BPK LEMBAGA NEGARA.**

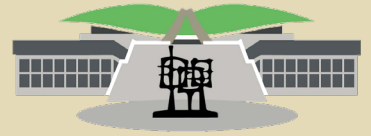
Anggota BPK terpilih. Slamet mengantongi 32 suara, meninggalkan rivalnya Dumoly Freddy Pardede yang mendapat 24 suara.

Mengenai pemilihan anggota BPK ini, Dolfie menilai bahwa masing-masing anggota dewan memiliki pertimbangannya tersendiri dalam menentukan pilihannya. Menurutnya dua nama yang berhasil meraup banyak suara itu memiliki kompetensi yang sesuai tugas BPK.

"Kalau ditanya apa pertimbangannya, anggota masing-masing punya pertimbangan tapi itu lah hasil yang merefleksikan bahwa dua orang ini yang dianggap memiliki kompetensi yang sesuai dengan BPK ke depan cuma lebih banyak yang memilih Slamet Eddy Purnomo," tutup politisi PDI-P itu. **ts/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai melepas tiga orang pegawai Setjen DPR RI yang masuk masa purna bakti di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, Nusanantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).** FOTO: RSB/PDT



**Upacara memperingati Hari lahir Pancasila di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.** FOTO: PDT



**Sidang komite untuk perempuan 'ASEAN Inter-Parliamentary Assembly' (WAIPA) di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023).** FOTO: AHA/PDT

